

**IMPLEMENTASI PROGRAM *URBAN FARMING* DI KELURAHAN MADE
KECAMATAN SAMBIKEREK
KOTA SURABAYA**

Lilik Wahyu Athariyanto

Tauran

ABSTRAK

Pelaksanaan kegiatan pertanian kota (*urban farming*) merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat yang bergerak pada bidang pertanian. Pada tahun 2007, Pemerintah Kota Surabaya telah mencanangkan program *urban farming* yang ditujukan khusus untuk keluarga miskin di Kota Surabaya. Program *urban farming* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memberdayakan masyarakat miskin dan sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan sumber daya manusia di bidang pertanian. Sebagai salah satu wilayah di Kota Surabaya yang mampu mengelola *urban farming* dengan baik, Kelurahan Made menjadi wilayah yang diteliti. Peneliti menggunakan enam variabel untuk mengetahui bagaimana implementasi program *urban farming* di Kelurahan Made, yakni sumber kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, serta sikap para pelaksana.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian yang diteliti berada di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Kelurahan Made dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kelurahan Made merupakan wilayah yang dikenal sebagai wilayah yang mampu mengelola *urban farming* dengan baik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah melalui teknik *purposive sampling* yang kemudian berkembang dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Penelitian ini juga menggunakan teknik *accidental sampling* untuk mendapatkan data. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan empat cara yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program *urban farming* di Kelurahan Made dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk komunikasi antarorganisasi yang berjalan dengan baik, adanya inovasi dalam pelaksanaan kegiatan serta sikap dari masing-masing pelaksana yang menunjukkan sikap penerimaan terhadap kebijakan. Pelaksanaan *urban farming* perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kapasitas yang dimiliki masyarakat miskin.

Kata Kunci : Implementasi, program, *urban farming*

Implementation of agricultural activities the city (urban farming) is one form of community empowerment program which operates in the field of agriculture. In 2007, city officials have launched a program specifically aimed at urban farming for poor families in the city of Surabaya. Urban farming program organized by the Surabaya City Government aims to reduce poverty, empower the poor and as a means of learning and improving human resources in agriculture. As one of the areas in the city of Surabaya, which is able to manage urban farming well, Village Made into areas studied. Researchers used six variables to

determine how the implementation of the urban farming program in the Village Made, the source of policies, measures and policy objectives, inter-organizational communication, implementation characteristics, economic environment, social and political, as well as the attitude of the implementers.

This research uses descriptive qualitative research approach. Studied research sites located in the Village District Sambikerep Made Surabaya. Made village chosen as the study site because the Village Made a region known as the region that is able to manage urban farming well. The sampling technique used was through purposive sampling technique, which was developed by using the snowball sampling technique. This study also using accidental sampling technique to obtain the data. For data collection techniques, this study used four ways namely observation, interviews, documentation and triangulation. The data obtained was analyzed using data reduction, data presentation, and then drawing conclusions.

Results of this study showed that the implementation of urban farming program in the Village Made executed properly. This can be seen from the form of inter-organizational communication that goes well, the lack of innovation in the implementation of the activities and attitudes of each executive indicating acceptance of the policy. Implementation of urban farming should be implemented on an ongoing basis to continue to improve and develop the capacity of the poor.

Keywords: Implementation, program, urban farming

1. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat pada sektor pertanian kembali menjadi isu yang dikembangkan dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat. Laporan *McKinsey Global Institute*, lembaga konsultan manajemen yang berfokus pada pemecahan isu manajemen dan pemerintahan, pada tahun 2012 menyatakan bahwa untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang besar, setidaknya harus memenuhi empat syarat, yaitu pemerintah harus fokus mengelola konsumsi dalam negeri, mengembangkan pertanian dan perikanan, mengelola sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia (Harian Kompas, 21 November 2012). Penguatan sektor

pertanian meliputi pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan ketrampilan sumber daya manusia masyarakat. Diyakini bahwa ke depan penguatan sektor pertanian akan memberikan manfaat yang optimal, terutama untuk kehidupan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Isu peningkatan kesejahteraan masyarakat selalu dikaitkan dengan upaya masyarakat menghadapi permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan sering dipersepsikan dengan kondisi kehidupan masyarakat di daerah-daerah/pedesaan. Pada kenyataannya di perkotaan, tingginya tingkat urbanisasi telah menciptakan kelompok masyarakat miskin di daerah perkotaan. D 1

Laporan Akhir Evaluasi Pelaksanaan *Urban Farming* Kota Surabaya tahun 2010, pada tahun 1994, 45% dari penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 50% pada tahun 2000 dan mendekati 65% pada tahun 2005. Kecenderungan serupa juga terjadi di Indonesia dimana proporsi penduduk di perkotaan sebesar 36,5% pada tahun 2000, diproyeksikan akan meningkat menjadi 44,5% dan 52,2%, masing-masing pada tahun 2010 dan 2020 (Laporan Akhir Evaluasi Pelaksanaan *Urban Farming* Kota Surabaya, 2010). Data ini mengindikasikan bahwa kemiskinan tidak lagi merupakan masalah yang menjadi dominasi di daerah pedesaan, tetapi juga semakin meningkat di daerah perkotaan dan pinggiran kota. Tingginya jumlah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang semakin meningkat telah memunculkan kelompok-kelompok masyarakat miskin baru di perkotaan. Kondisi ini memerlukan perhatian pemerintah kota untuk menyikapinya.

Di Kota Surabaya, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian dilaksanakan sejak tahun 2007. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Surabaya. Pada tahun 2010, jumlah angka kemiskinan di Kota Surabaya

mencapai 112.465 penduduk atau sekitar 4,32% dari jumlah penduduk di Kota Surabaya. Seperti kota metropolitan yang lainnya, Kota Surabaya menghadapi banyak permasalahan seperti pengangguran, kemiskinan, kriminalitas dan lingkungan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015, pertanian kota (*urban farming*) dianggap sebagai program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Urban farming merupakan program yang bersifat spesifik untuk memacu peningkatan taraf hidup masyarakat miskin yang bergerak dalam penguatan sektor pertanian kota. Diharapkan dengan adanya program *urban farming* ini, jumlah angka kemiskinan di Kota Surabaya menurun dan kehidupan ekonomi masyarakat akan terus meningkat. Program *urban farming* di Kota Surabaya juga merupakan salah satu implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk merespon isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat. Seperti isu kemiskinan, lingkungan dan pertanian.

Urban farming didefinisikan sebagai usaha tani, pengolahan, dan distribusi dari berbagai komoditas pangan

termasuk sayuran dan peternakan di dalam atau di pinggiran wilayah kota. Secara teknis, *urban farming* merupakan kegiatan yang meliputi pertanian, perikanan dan peternakan dengan memanfaatkan lahan perkarangan atau lahan kosong yang tidak terpakai. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka untuk mengetahui bagaimana implementasi program *urban farming* di Kota Surabaya, diperlukan adanya suatu penelitian yang menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan *urban farming* di Kota Surabaya. Untuk mengetahui pelaksanaan *urban farming* di Kota Surabaya, Kelurahan Made merupakan contoh wilayah yang telah melaksanakan program *urban farming* dengan baik.

Proses pelaksanaan *urban farming* di Kelurahan Made akan dianalisis menggunakan enam variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yakni sumber-sumber kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik serta sikap para pelaksana.

2. Kajian Teori

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan publik.

Definisi tersebut juga dikatakan oleh Dye dalam Suharto (2010:44) yang memberikan definisi secara luas yakni sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” (apapun yang dilakukan pemerintah untuk memutuskan atau tidak memutuskan). Sementara itu Anderson dalam Suharto (2010:44) , menyampaikan definisi kebijakan publik yang lebih spesifik yaitu sebagai “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005:102) “implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Nugroho (2008), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Nugroho (2008) juga menyetujui bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan untuk mencapai tujuan kebijakan. Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Nugroho (2008) mengemukakan definisi implementasi kebijakan. *Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives order or court decision. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued and in a variety of ways, 'structures' the implementation process.*

c. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan milik Van Horn dan Van Meter dikenal sebagai model yang klasik. Donald Van Meter dan Carl Van Horn memperkenalkan gagasannya mengenai model implementasi kebijakan pada tahun 1975. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari pembuat kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van

Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012) bahwa beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan (Agustino, 2006). Ukuran dan tujuan kebijakan menjadi pijakan awal mengenai bagaimana kebijakan diimplementasikan. Ukuran dan tujuan kebijakan digunakan untuk menjadi acuan dalam kegiatan implementasi kebijakan. Aktivitas-aktivitas pelaksana dan bagaimana sikap pelaksana, para pelaksana harus berpacu pada ukuran dan tujuan kebijakan.

2. Sumber-sumber kebijakan

Variabel sumber-sumber kebijakan yang dimaksud bukanlah sumber kebijakan yang berdasar pada aturan hukum legal formal, tetapi sumberdaya yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Agustino (2006), keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan berupa sumberdaya manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya

waktu. Karena ketiga sumberdaya tersebut saling tergantung dalam implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Agen pelaksana kebijakan dapat meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Karakteristik atau ciri-ciri agen pelaksana akan sangat menentukan bagaimana kecenderungan sikap dan kinerja agen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan publik. Agustino (2006) menyatakan kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

4. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan

Komunikasi antarorganisasi merupakan kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan publik akan melibatkan beberapa agen pelaksana dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan. Dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan para agen pelaksana akan terjadi suatu interaksi atau koordinasi yang bersifat saling bekerjasama demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-

kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi (Agustino, 2006:144).

5. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana berkaitan dengan bagaimana para pelaksana memberikan respon terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah para pelaksana memberikan sikap berupa penerimaan atau penolakan atas kebijakan yang akan diimplementasikan. Ketika para pelaksana memberikan sikap, hal yang dipengaruhi adalah kinerja dari para pelaksana kebijakan. Ketika para pelaksana memberikan sikap dengan menerima kebijakan, maka ini menjadi bukti bahwa pelaksana telah siap dan berkomitmen dalam melaksanakan suatu kebijakan. Begitu pula sebaliknya, ketika penolakan diberikan oleh pelaksana, maka menjadi tanda bahwa pelaksana belum siap untuk melaksanakan kebijakan

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik pada suatu lingkungan kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Agustino (2006) mengatakan bahwa lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik suatu daerah/wilayah dapat memberikan dampak yang bersifat

konstruktif atau destruktif. Keberadaan masyarakat sekitar akan memberikan dukungan ataupun ancaman terhadap pelaksanaan kebijakan. Oleh karenanya, latar belakang kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan politik perlu diperhatikan dalam melaksanakan suatu kebijakan

3. Metode Penelitian

Penelitian implementasi program *urban farming* di Kelurahan Made menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penggunaan metode kualitatif, diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Seperti dikemukakan oleh Sugiyono (2012:3), metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Lokasi penelitian yang dipilih untuk dikaji adalah Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Kelurahan Made dipilih karena dianggap sebagai wilayah yang mampu mengelola program urban farming dengan baik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, snowball sampling dan accidental sampling. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

teknik wawancara, dokumentasi, observasi dan triangulasi.

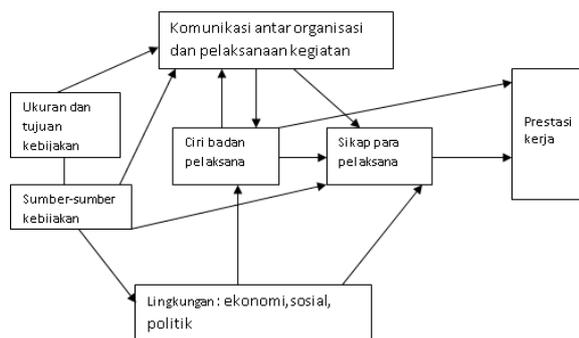
Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program *urban farming* yang dicetuskan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan dilaksanakan oleh Gabungan Kelompok Tani Made Bersinar. Gapoktan Made Bersinar merupakan gabungan kelompok tani yang beranggotakan sekitar 563 penduduk Kelurahan Made dan melaksanakan kegiatan pertanian/bercocok tanam di lahan persawahan maupun lahan pekarangan. Tanaman yang dikembangkan oleh Gapoktan Made Bersinar adalah tanaman hortikultura seperti cabe, tomat, jagung dan tanaman sayuran lainnya. Dari keseluruhan pelaksanaan *urban farming* di Kelurahan Made, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kegiatan bercocok tanam tanaman hortikultura yang dilaksanakan oleh Gapoktan Made Bersinar yang berdasarkan dari enam variabel yakni sumber kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antarorganisasi, ciri badan pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik dan sikap dari pelaksana.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles and Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas dan data hingga benar-benar akurat. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi program *urban farming* di Kelurahan Made Kota Surabaya dianalisis berdasarkan enam variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dan sikap dari pelaksana. Berikut merupakan skema model implementasi Van Meter dan Van Horn :



Urban farming di Kota Surabaya telah dirancang oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan segala bentuk dan tujuannya. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn mengamanatkan bahwa tujuan dan ukuran kebijakan merupakan salah satu variabel yang diurai

untuk menganalisis suatu kebijakan. Pelaksanaan *urban farming* di Kota Surabaya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di bidang pertanian. Tujuan kebijakan tersebut akan mempengaruhi tentang bagaimana komunikasi dan pelaksanaan kegiatan *urban farming* di lapangan dalam mencapai tujuan kebijakan *urban farming*. Karena ukuran dan tujuan suatu kebijakan merupakan acuan tentang bagaimana bentuk komunikasi antarorganisasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Komunikasi antarorganisasi dan pelaksanaan kegiatan *urban farming* di Kelurahan Made dapat dikatakan cukup baik. Dinas Pertanian Kota Surabaya menjamin bahwa akan ada suatu interaksi/komunikasi antarpelaksana *urban farming* dengan ditunjukkan adanya agenda kegiatan *urban farming* yang dibuat selama satu tahun. Begitu pula dengan organisasi ditingkat Kelurahan Made, yakni Gapoktan Made Bersinar dan berbagai kelompok Tani di Kelurahan Made, organisasi kelompok tani di Kelurahan Made juga mengagendakan pertemuan dengan Dinas Pertanian Kota Surabaya dan pihak lain seperti tenaga penyuluh atau THL/PPL.

Pemerintah Kota Surabaya telah mencanangkan *urban farming* sebagai program pemberdayaan masyarakat

dengan segala petunjuk teknis, maksud dan tujuannya, tetapi Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki tolak ukur yang jelas terhadap keberhasilan program *urban farming*. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak ditemukannya informasi yang jelas terkait alat ukur kebijakan *urban farming* di Kota Surabaya. Tidak adanya ukuran kebijakan *urban farming* ini akan mempersulit Pemerintah Kota Surabaya dalam mengevaluasi program *urban farming*. Dan juga akan menghambat proses pengembangan desain *urban farming* di Kota Surabaya mendatang, karena *input* atau *feedback* yang muncul dari evaluasi program tidak didapatkan.

Hal penting lainnya dalam suatu implementasi kebijakan adalah sumber-sumber kebijakan. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dinyatakan bahwa sumber kebijakan merupakan bagian yang tidak terlepas dari suatu implementasi kebijakan. Sumber kebijakan yang dimaksud adalah sumberdaya yang dimiliki dalam melaksanakan kebijakan, yakni sumberdaya manusia, finansial dan waktu. Sumberdaya tersebut akan memberikan pengaruh terhadap bagaimana pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Kelurahan Made memiliki sumberdaya dan infrastruktur yang bisa dikatakan cukup memadai untuk melaksanakan *urban*

farming di wilayahnya. Adanya pemanfaatan teknologi seperti *broadband learning center*, dan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa rumah pengemasan (*packaging house*), serta adanya ketersediaan sumberdaya manusia di Kelurahan Made yang berupa kelompok-kelompok tani, membuat pelaksanaan *urban farming* di Kelurahan Made dapat berjalan lancar secara teknis. Dimulai dari kegiatan pembibitan tanaman, perawatan dan memetik hasil panen yang dilakukan para petani, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut berjalan dengan dukungan sumberdaya dan infrastruktur yang memadai. Tetapi secara finansial, pelaksanaan *urban farming* di Kelurahan Made cukup sulit untuk diuraikan, karena sifat pembiayaan *urban farming* di Kelurahan Made tidak bersifat kolektif atau komunal, melainkan dibiayai oleh petani *urban farming* secara individu.

Selain adanya ketersediaan infrastruktur sarana dalam peningkatan kegiatan *urban farming*, Masyarakat Kelurahan Made juga memiliki potensi yang dapat menunjang pelaksanaan *urban farming* dari keadaan sosial masyarakatnya di wilayahnya. Terdapat kebiasaan unik yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Made dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya kegiatan yang bernama

Tegal Desa. Kegiatan Tegal Desa di Kelurahan Made merupakan kegiatan berkumpul di balai desa dengan mengadakan semacam upacara yang menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan yang telah diberikan. Seluruh warga Kelurahan Made tanpa terkecuali diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, tanpa memandang latar belakang agama, pendidikan ataupun ras. Kegiatan Tegal Desa ini menjadi tanda bahwa kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Made sangat terjaga. Kerukunan dalam masyarakat inilah yang menjadikan kondisi sosial masyarakat di Kelurahan Made kondusif dan menjadi potensi penunjang pelaksanaan *urban farming* di Kelurahan Made.

Variabel lain yang juga mempengaruhi prestasi kebijakan secara langsung berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn adalah sikap dari para pelaksana. Sikap dari pelaksana merupakan variabel yang membahas mengenai bagaimana sebenarnya sikap yang diberikan para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Sikap yang dimaksud adalah respon dari para pelaksana. Apakah para pelaksana memberikan respon berupa keseriusan atau ketidakseriusan terhadap pelaksanaan kebijakan. Meskipun dalam pelaksanaannya, masing-masing organisasi

telah memiliki tugas dan spesialisasi yang jelas, tetapi kemungkinan adanya suatu penyakit (patologi) birokrasi/organisasi mungkin terjadi dalam penyelenggaraan program. Dan juga terkait keinginan/kemauan dari para pelaksana dalam menjalankan program. Ada beberapa kemungkinan bahwa organisasi pelaksana tidak serius dalam melaksanakan tugasnya. Ketidakseriusan suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya dapat terlihat dengan minimnya produktivitas dan inovasi organisasi/pelaksana. Dan adapun kemungkinan lain sikap dari para pelaksana yang bersifat sangat prosedural yakni hanya melaksanakan kegiatan secara prosedural tanpa muncul suatu perubahan atau gagasan baru dalam melaksanakan kebijakan. Kemungkinan adanya sikap dari pelaksana tersebut dapat menghambat pencapaian keberhasilan kebijakan.

Sikap dari pelaksana *urban farming* di Kelurahan Made sebenarnya dapat dikatakan cukup baik. Terdapat beberapa inovasi yang segar dan menarik dari pelaksana *urban farming* di Kelurahan Made, seperti adanya program SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu), *broadband learning center*, dan *packaging house*. Adanya inovasi tersebut menandakan bahwa para pelaksana cukup serius dalam mengembangkan program

urban farming. Tidak hanya terdapat inovasi yang baru, tetapi keseriusan para pelaksana *urban farming* di Kelurahan Made juga tercermin pada komunikasi antarorganisasi yang terbentuk. Koordinasi antarorganisasi pada pelaksanaan *urban farming* di Kelurahan Made berjalan lancar. Pertemuan rutin antarorganisasi terus dilaksanakan bahkan telah diagendakan oleh masing-masing organisasi.

Keseluruhan pelaksanaan *urban farming* di Kelurahan Made berdasarkan pada enam variabel model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yaitu tujuan dan ukuran kebijakan, sumber kebijakan, ciri badan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan sikap dari pelaksana telah berdampak kepada prestasi kerja yang telah diraih oleh masyarakat Kelurahan Made. Bentuk capaian/prestasi yang didapat oleh masyarakat Kelurahan Made ditandai dengan adanya komoditas perdagangan hasil tanaman pertanian di Kelurahan Made. Kemudian telah adanya suatu fasilitas yang cukup memadai untuk melaksanakan *urban farming* di Kelurahan Made hasil dari keseriusan para pelaksana *urban farming* Kelurahan Made. Banyaknya para petani yang telah mampu untuk merawat tanamannya secara mandiri meskipun perlu adanya pendampingan dari pihak luar petani.

5. Kesimpulan dan Saran

Penyelenggaraan *urban farming* di Kelurahan Made dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini ditandai dengan menurunnya jumlah angka kemiskinan dan telah terdapat komoditas perdagangan hasil pertanian di Kelurahan Made. Para petani di Kelurahan Made telah mampu memasarkan produknya di pasaran dan mendapatkan manfaat finansial dari hasil penjualan produk hasil pertanian. Selain, manfaat dari segi finansial, juga terdapat manfaat lain dari penyelenggaraan *urban farming* di Kelurahan Made, yakni adanya semangat untuk mengembangkan diri dari dalam masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan *urban farming*.

Tetapi, dalam proses penyelenggaraan *urban farming* di Kelurahan Made, terdapat banyak kekurangan yang bersifat konseptual yang harus dibenahi. Seperti terkait permasalahan bagaimana Pemerintah Kota Surabaya menjamin keberlangsungan pelaksanaan *urban farming*. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya suatu aturan hukum yang jelas yang menjamin dan melindungi kegiatan pertanian kota (*urban farming*) di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya terkesan tidak serius dalam mengembangkan *urban farming* untuk jangka yang panjang. Peraturan terkait

pelaksanaan *urban farming* perlu dibuat untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan urban farming dan juga untuk mengemas kebijakan *urban farming* sebagai suatu kebijakan yang utuh dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Berikutnya adalah terkait dengan ukuran keberhasilan kebijakan *urban farming* di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 belum menentukan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan *urban farming*. Sehingga pengembangan desain *urban farming* di seluruh wilayah Kota Surabaya termasuk Kelurahan Made akan berjalan lambat. Tanpa adanya tolak ukur yang jelas terkait pelaksanaan *urban farming* maka akan sulit pula untuk diketahui apakah kebijakan *urban farming* berhasil atau tidak.

Kekurangan lainnya yang perlu dibenahi untuk pelaksanaan *urban farming* adalah terkait dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia, khususnya pada fasilitator pendamping kelompok dan THL/PPL. Dalam skala kecamatan, jumlah THL/PPL sangat kurang, yakni hanya terdapat satu petugas saja. Tentu dalam jangka yang panjang, hal ini akan menjadi permasalahan yang serius bagi pelaksanaan *urban farming* di Kota Surabaya.

Adapun hal lain yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan *urban farming* di Kelurahan Made adalah dengan memberikan peran yang lebih besar kepada pihak Kelurahan Made. Pada penyelenggaraan *urban farming* di Kelurahan Made, tidak terdapat peran yang berarti dari Kelurahan Made dalam melaksanakan *urban farming*. Seharusnya, sebagai pemerintah di tingkat kelurahan, Kelurahan Made dapat berperan lebih banyak dalam pelaksanaan *urban farming*. Hal ini ditujukan agar para birokrasi Kelurahan Made dapat membantu petani *urban farming* dalam urusan-urusan administratif para petani.

Pada akhirnya pelaksanaan program *urban farming* di Kelurahan Made Kota Surabaya adalah suatu proses pemberdayaan masyarakat yang harus dilaksanakan dalam waktu yang cukup panjang. Pemberdayaan terhadap masyarakat harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan pemantauan yang bersifat komprehensif pula. Pemberian kapasitas masyarakat melalui program *urban farming* telah memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat. Melalui program *urban farming*, masyarakat akan mendapatkan berbagai macam manfaat. Pelaksanaan *urban farming* di Kelurahan Made telah menjadi contoh bahwa proses

pemberdayaan masyarakat harus dilakukan pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan dan terus menerus. Diharapkan, pelaksanaan *urban farming* di masa mendatang akan berkembang lebih baik diimbangi dengan kuantitas dan kualitas yang baik pula.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Surabaya. 2010. *Laporan Akhir Evaluasi Pelaksanaan Urban Farming*

Bungin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif (Edisi Pertama)*. Jakarta : Kencana

Dinas Pertanian Kota Surabaya. 2012. *Petunjuk Teknis Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Hortikultura (urban farming)*

_____.2012. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Surabaya Tahun 2010-2015

Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Koran KOMPAS. 2012. 21 November

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo

Sam C. M. Hui . 2011. *Green roof urban farming for buildings in high-density urban cities*, Invited paper for the Hainan China World Green Roof Conference 2011 18-21 March 2011, Hainan (Haikuo, Boao and Sanya), China

Soenarko. 2000. *Kebijaksanaan Pemerintah Surabaya*. Surabaya : Airlangga University Press

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo